

LAPORAN PENELITIAN
IMPLEMENTASI PROGRAM TUNGGAKAN BIAYA
PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA
YOGYAKARTA 2016

(Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Praktik Pengalaman Lapangan)

Dosen Pembimbing: Ariefa Efianingrum, M.Si.



Disusun Oleh:
SHINTA RAHMAWATI
13110241065

KEBIJAKAN PENDIDIKAN
FILSAFAT DAN SOSIOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016

LEMBAR PENGESAHAN

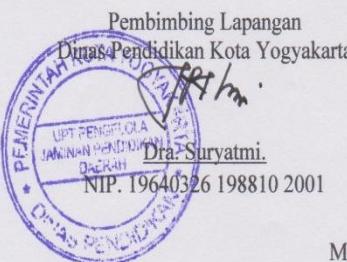
Pengesahan laporan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta:

Nama : Shinta Rahmawati
NIM : 13110241065
Prodi : Kebijakan Pendidikan
Jurusan : Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta
Telp : 087839693404

Telah melaksanakan PPL dan menyusun laporan penelitian PPL yang berjudul **“Implementasi Program Tunggakan Biaya Pendidikan Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta 2016”** yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli s/d 15 September 2016.

Yogyakarta, 3 Oktober 2016

Menyetujui,



Dosen Pembimbing Lapangan
Ariefa Efianingrum, M.Si
NIP. 19740411 199802 2001

Mengetahui,

Kepala Dinas Pendidikan



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Tunggakan Biaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta,” merupakan salah satu kegiatan penelitian yang peneliti lakukan pada saat Praktik Pengalaman Lapangan.

Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Ariefa Efianingrum, M.Si. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Serta berkat pemberian tugas ini penulis dapat memperdalam pengetahuan mengenai karya ilmiah yang sangat bermanfaat, terkhusus dalam penulisan skripsi nantinya.
2. Pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terutama UPT Jaminan Pendidikan Daerah yang telah memberikan beragam informasi terkait penyusunan laporan yang dibuat.
3. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan laporan penelitian yang dibuat. Demi kesempurnaan laporan penelitian pada nantinya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Yogyakarta, 15 September 2016

Shinta Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Analisis Situasi	1
B. Perumusan Program Kegiatan	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Persiapan.....	4
B. Pelaksanaan Program.....	23
C. Analisis Hasil Pelaksanaan.....	26
BAB III PENUTUP	31
A. Kesimpulan.....	31
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	40

IMPLEMENTASI PROGRAM TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN DI DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

ABSTRAK

Shinta Rahmawati

13110241065

Kebijakan Pendidikan

Program penelitian mahasiswa yang berjudul “Implementasi Program Tunggakan Biaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta” ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan yang ada di JPD yaitu Program Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan di tingkat SMK di Kota Yoyakarta serta faktor pendukung dan penghambat program tersebut.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti membawa daftar pertanyaan sebagai acuan dalam pengambilan data dari responden atau narasumber kemudian peneliti menguraikan maupun memaparkan dengan kata-kata sesuai pernyataan responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Selain itu untuk memperkuat data yang dicari, peneliti melakukan dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Subyek penelitian adalah pihak JPD dan sekolah.

Penelitian dilaksanakan di lingkup Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMK Tamansiswa Jetis, dan SMK N 3 Yogyakarta. Hasil analisis dari program penelitian tersebut yaitu dalam program tunggakan sosialisasi hanya dilakukan kepada sekolah, karena jika mengadakan sosialisasi kepada orang tua siswa akan lepas tanggung jawab dalam membayai pendidikan anaknya dan semakin banyak orang tua yang sebenarnya mampu membayar namun tidak membayar supaya dapat bantuan tunggakan. Ada beberapa faktor yang mendukung program tunggakan biaya, yaitu ketersediaan dana, mengingat program ini sudah menjadi kebijakan pemerintah kota dengan adanya peraturan-peraturan walikota yang cukup jelas pula. Dalam pelaksanaannya, program tunggakan biaya pendidikan memiliki hambatan terutama jumlah tunggakan yang terlalu besar sedangkan jumlah bantuan yang kita berikan itu sudah mencapai maksimal. UPT JPD setiap tahunnya juga melakukan evaluasi atau monitoring bersama-sama.

Kata kunci : Implementasi, JPD, Program Tunggakan Biaya Pendidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Sebelum kegiatan PPL berlangsung, telah dilakukan observasi dan penerjunan PPL I pada tanggal 16 Februari 2016 di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selanjutnya kami ditempatkan di beberapa bagian yang ada di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, diantara lain Bagian Keuangan, PNF, Kepegawaian, Umum, JPD, ADP, Bangdik, Dikmen, dan Dikdas. Saya dan dua teman lain mendapatkan bagian di UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kami memperoleh beberapa data dan informasi tentang Dinas pendidikan kota Yogyakarta khususnya bagian UPT Jaminan Pendidikan Daaerah yang digunakan sebagai dasar acuan atau gambaran awal dalam melakukan kegiatan PPL tahun 2016 ini.

UPT JPD berada di lantai satu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yakni bersebelahan dengan ruang pengawas dan berdekatan dengan kantin Dinas. Secara keseluruhan bangunan gedung Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah gedung baru, namun masih ada beberapa bangunan yang sedang dalam renovasi, kebersihan Dinas pun selalu terjaga. Beberapa sarana dan prasarana perkantoran (fasilitas) yang tersedia sudah cukup memadai untuk menunjang kegiatan dan kinerja di instansi tersebut. Di JPD sendiri mengingat gedung dinas masih baru, maka ruangan UPT JPD pun sangat bersih dan nyaman karena memiliki fasilitas yakni beberapa AC, beberapa unit computer, mesin print, fotocopy mini, meja dan kursi yang kemarin pun ketika saya melakukan observasi kembali melihat kursi sofa baru beserta meja di sudut depan ruangan untuk tempat tamu menunggu layanan.

Di UPT JPD tercipta suasana kerja yang begitu kondusif, banyak tamu yang datang untuk konsultasi bosda maupun mengajukan bantuan, interaksi antar pegawai maupun tamu yang datang sangat baik, masyarakat maupun guru yang berkeluh kesah juga disambut dengan baik, dan kerjasama sangat terlihat dimana pegawai satu dengan yang lain saling membantu meskipun tugas mereka sudah ada porsinya (sudah dibagi-bagi). Di dalam kantor sudah memiliki peralatan printer di tiap meja serta mesin fotocopy satu unit sehingga memudahkan dalam pekerjaan.

Namun, di UPT JPD masih memiliki beberapa masalah seperti masih belum terdapat rak-rak untuk menaruh buku maupun dokumen lainnya seperti kemarin saya menemui laporan bosda dan lain-lain hanya di letakkan di

sudut-sudut tembok dan itu sangat menganggu pemandangan dan mengurangi kerapian kantor JPD. Batas antar unit hanya triplek dan ukurannya hanya setengah bangunan sehingga suara berlalu lalang, ramai, dan privasi antar unit kurang terjaga. Kemudian ketika saya melakukan wawancara, beban kerja dari pegawai satu ke yang lain meskipun baik namun tentunya memberatkan pegawai menjadi tidak fokus dengan masalahnya sendiri. Keterlambatan data juga sering dirasakan oleh pegawai di UPT JPD misalnya ingin mengajukan bantuan tetapi dari pihak sekolah terlambat dalam pendataan maupun pemberitahuan kepada pihak JPD sehingga memperlambat proses pemberian bantuan, ada juga dari pihak kelurahan yang terlambat menyertorkan nilai siswa yang memiliki ranking atas tingkat kelurahan, pihak JPD sudah memutuskan penerima beasiswa prestasi namun harus merubah lagi keputusannya karena ada susulan nilai yang lebih tinggi dari kelurahan. Pegawai di JPD juga mengaku kewalahan dalam pencairan dana di kelurahan tersebut maka solusinya mereka bekerjasama dengan pihak Bank BPD. Masyarakat yang datang langsung di kantor ada yang mudah diberi penjelasan ada pula yang sulit, terkadang ada beberapa yang tidak menerima bahwa biaya yang dibantu besarnya kurang dari yang diinginkan. Pencairan dana pun juga mengalami kendala keterlambatan seperti kemarin Juli namun baru bisa cair bulan Oktober.

UPT Jaminan Pendidikan Daerah terdiri dari 1 kabit, 1 ka.TU, 1 Bendahara dan 3 Staf. UPT Jaminan Pendidikan Daerah memiliki beberapa program utama yaitu, Beasiswa KMS, Beasiswa Prestasi Kelurahan, Beasiswa Prestasi Mahasiswa, dan Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan. Serta terdapat program pengembangan yaitu Softskill dan Outbond bagi siswa KMS tingkat SMP dan SMA/SMK. Para pegawai di UPT JPD mengatakan bahwa mereka kekurangan tenaga kerja. Mereka menganggap beban kerja mereka yang tinggi yakni melayani masalah masyarakat yang berbagai macam, dengan latar belakang yang berbeda pula ada yang dari panti asuhan, SLB, dan masyarakat umum. Pekerjaan yang perlu dilembur di kantor meskipun sudah jam pulang kerja karena pekerjaan yang banyak dan mereka sadar bahwa itu memang tanggungjawab mereka sebagai pegawai JPD. Para pegawai pun mengaku senang meskipun terkadang kewalahan namun mereka bisa menghilangkan beban masyarakat dengan keluh kesah masyarakat yang datang.

B. Perumusan Program Kegiatan

Berdasarkan hasil analisis situasi dari kegiatan observasi maka akan dirumuskan sebuah program kegiatan penelitian sederhana. Adapun judul yang saya ambil yaitu “*Implementasi Program Tunggakan Biaya Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2016*” yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan dua sekolah menengah kejuruan (SMK) yakni SMK Tamansiswa Jetis dan SMK N 3 Yogyakarta. Program kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program tunggakan biaya pendidikan berlangsung serta bagaimana prosesnya. Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini meliputi observasi, wawancara dengan pihak UPT JPD dan pihak sekolahan.

Hasil dari program ini semoga dapat dijadikan rekomendasi dan referensi bagi UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selain itu program kegiatan ini juga dapat melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian dan menyusun laporan penelitian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Persiapan Pelaksanaan Program

Sebelum program ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan persiapan agar program ini benar-benar dapat terlaksana dengan maksimal. Terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan dosen pembimbing lapangan dalam perumusan kegiatan. Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan juga dilakukan koordinasi dengan pihak UPT JPD terkait proposal yang nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Untuk memudahkan proses pelaksanaan program perlu adanya mempersiapkan instrumen penelitian. Instrumen yang diperlukan meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Semua instrumen tersebut akan digunakan ketika proses pengumpulan data.

Agar program ini benar-benar valid maka perlu adanya pengumpulan kajian teori. Kajian teori berguna sebagai dasar dalam melaksanakan program. Teori-teori yang dikumpulkan juga akan mempermudah ketika penyusunan laporan. Sehingga program kegiatan ini benar-benar memiliki dasar teori dan valid. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai dasar antara lain:

1. Kebijakan Pendidikan

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dalam buku Arif Rohman (2012:79), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman tersebut bisa berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Suatu kebijakan sebenarnya terdiri dari banyak komponen. Menurut Charles O. Jones, komponen-komponen dari suatu kebijakan tersebut adalah mencakup lima hal: *goal, plans, program, decision, dan effects*.

Penjelasan khusus mengenai kebijakan pendidikan belum banyak dibicarakan oleh para ahli, kebijakan pendidikan merupakan kebijakan public yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam

pendidikan. Suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripsi antara dunia cita-cita dengan dunia nyata, yakni bisa diartikan adanya kesenjangan antara keadaan ideal dengan realitas yang terjadi. Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara keduanya.

Paling tidak ada dua hal yang dapat dirasakan sebagai pemicu adanya masalah: pertama, bahwa perjalanan kehidupan suatu bangsa mengalami lika-liku yang beranekaragam. Bahkan lika-liku perjalanan suatu bangsa tersebut terkadang menghadapi suatu hal yang sulit diduga serta belum pernah dikenali sebelumnya atau belum dapat diidentifikasi. Sehingga membutuhkan upaya baru pula dalam menghadapinya atau mengatasinya. Misalnya, masalah pendidikan anak-anak yang terlantar akibat kerusuhan antaretnis di Ambon, Sampit, Poso, yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan dari pemerintah yang tepat dan akurat. Kedua, adanya tuntutan (*expectation*) yang lebih tinggi dari sekedar yang ada selama ini. Misalnya, akibat minimnya kesejahteraan guru yang berefek pada kandasnya upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan, membutuhkan terobosan kebijakan baru dari pemerintah dalam menaikkan anggaran pendidikan khususnya gaji guru.

Suatu kebijakan pendidikan dirancang dan dirumuskan untuk selanjutnya dapat diimplementasikan, sebenarnya tidak begitu saja dibuat. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan secara hati-hati terlebih menyangkut persoalan krusial atau perosalan makro, maka hampir pasti perumusan kebijakan pendidikan tersebut dilandasi oleh suatu faham teori tertentu. Dalam proses perumusannya, para pemegang kewenangan pengambilan kebijakan terlebih dahulu telah mempertimbangkan secara matang dengan menggunakan rasionalitas, memperhatikan proses, hasil, dan efek atau dampak yang ditimbulkan nantinya.

2. Implementasi Program

Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Dalam pengertian tersebut menggambarkan bahwa program-program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam mencapai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Program-program tersebut muncul dalam Rencana Strategis Kementerian atau Rencana Kerja Pemerintah. Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996:295).

Menurut McDavid J.C. & Hawthorn, L.R.L., (2006:15) mendefinisikan program sebagai hubungan makna yang dirancang dan diterapkan dengan *purposive*. Suatu program dapat dipahami sebagai kelompok dari aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai satu atau terkait beberapa sasaran hasil. Menurut Farida Yusuf Tayibnabis (2000:9) mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa program merupakan rancangan cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai satu atau terkait beberapa sasaran hasil.

Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu:

- a. Kegiatan yang direncanakan atau dirancang dengan seksama. Bukan asal rancangan tetapi rancangan kegiatan yang disusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat.
- b. Kegiatan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
- c. Kegiatan tersebut berlangsung dalam sebuah organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.

d. Kegiatan tersebut dalam implementasi atau pelaksanaanya melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa ada kaitannya dengan kegiatan orang lain.

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan.

“A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action and activities for achieving overall policy objectives” (suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Organisasi

Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparatur pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur

dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

- Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- a.) Sesuai Dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik peraturan tingkat pusat, provinsi, kabupaten.

- b.) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktivitas pelaksanaan program.

- c.) Sesuai Petunjuk Teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan

dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistik.

- Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

- a) Prosedur kerja yang jelas

Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

b) Program kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat direalisasikan dengan efektif.

c) Jadwal kegiatan

Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”(Usman, 2002:70). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dandilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang salingmenyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004:39). Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi program merupakan proses suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dengan harapan agar orang lain dapat menerima melalui cara-cara atau langkah-langkah dalam mencapai tujuan

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Untuk mencapai tujuan implemetasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Wibawa, 1994:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

3. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi suatu Program

Donald P.Warwick dalam buku Syukur Abdullah, (1988:17) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impeding conditions*).

1. Faktor Pendorong (*Facilitating Conditions*)

Yang termasuk kondisi kondisi atau faktor pendorong adalah :

a. Komitmen pimpinan politik

Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa.

b. Kemampuan organisasi

Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi. Kemampuan organisasi (*organization capacity*) terdiri dari 2 unsur pokok yaitu :

1) Kemampuan teknis

2) Kemampuan dalam menjalin hubungan dengan organisasi lain.

c. Komitmen para pelaksana (*implementer*)

Salah satu asumsi yang seringkali keliru adalah jika pimpinan telah siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk mengerjakan dan melaksanakan sebuah kebijaksanaan yang telah disetujui amat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, psikologis, dan birokratisme.

d. Dukungan Pelaksanaan program dan proyek

Seringkali berhasilnya pelaksanaan program dan proyek tergantung pada dukungan dari berbagai pihak yang berpengaruh. Dukungan ini dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah pusat dan daerah, lembaga non-pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Dukungan yang kuat dan konsisten akan mempermudah pelaksanaan program dan proyek.

2. Faktor Penghambat (*Impeding Conditions*)

Yang termasuk kondisi kondisi atau faktor-faktor penghambat terdiri dari :

a. Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat.

Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program, karena rumitnya komunikasi maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.

b. Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda.

Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lain.

- c. Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri. Sering sebuah program mengalami kesulitan dalam pelaksanaanya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. Hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor perilaku pelaksana maupun masyarakat.
- d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan berarti makin banyak dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan program.

Terdapat dua proses yaitu :

Proses 1: Memantau kegiatan harian dalam pelaksanaan kebijakan. Apakah semua rencana kebijakan dilaksanakan? Apakah staff pelaksana sudah dilatih untuk melakukan tugasnya?

Proses 2: Penilaian kegiatan dan kepuasan klien dengan layanan yang diberikan. Apa yang telah dilakukan/diberikan, kepada siapa/kelompok mana? Adakah cara yang lebih baik supaya pelaksanaan tugas lebih efisien?

Model Implementasi Kebijakan

1. Kebijakan yang diinginkan (*idealized policy*); pola interaksi yang dikehendaki dan apa yang hendak diubah oleh suatu kebijakan.
2. Kelompok sasaran (*target group*); sekelompok masyarakat yg hendak dipengaruhi dan diubah.
3. Organisasi pelaksana (*implementing organisation*); sebuah satuan birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab atas kebijakan tertentu.
4. Faktor lingkungan (*environmental factors*); unsur-unsur lingkungan kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Keberhasilan Implementasi

1. Program dirancang dengan landasan yang jelas, dengan kelompok sasaran, perubahan perilaku, dan tujuan yang jelas.
2. Pendukung kebijakan memuat arahan dan struktur organisasi yang tepat sehingga memaksimalkan proses pelaksanaan.
3. Pemimpin lembaga punya keterampilan manajerial dan politik yang memadai.
4. Program didukung oleh kelompok konstituen yang terorganisasi dengan dukungan legislatif yang kuat.

5. Prioritas kebijakan tidak diganggu oleh konflik diantara perumus kebijakan dan perubahan kondisi sosial-ekonomi

4. Biaya Pendidikan

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 31 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3)

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenui kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan dapat dilihat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendewasakan manusia, sementara itu secara praktis pendidikan akan terlihat dari kelembagaannya, yang menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 terdapat tiga lingkungan pendidikan yaitu pendidikan informal, pendidikan nonformal, dan pendidikan formal.

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal sudah tentu memerlukan pengelolaan yang impersonal, di dalamnya perlu dan harus diterapkan prinsip-prinsip manajemen modern, di mana objek yang menjadi perhatiannya secara umum tidak banyak berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Namun demikian hal itu sudah tentu memerlukan penyesuaian agar dapat sejalan dengan misi lembaga

pendidikan sebagai lembaga nirlaba. Di sisi lain tidak mungkin lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatannya dalam menyelenggarakan proses pendidikan. Oleh karena itu dalam dunia pendidikan kajian mengenai pendanaan/pembiayaan pendidikan menduduki posisi penting sebagai suatu upaya untuk memahami dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan/manajemen dana/keuangan dalam lembaga pendidikan, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

Dana pendidikan merupakan isu yang paling kontroversial dalam ekonomi pendidikan karena terdapat ketidaksepakatan tidak hanya pada apakah pemerintah sebagai satu-satunya yang berperan dalam pendidikan, tetapi juga mengenai seharusnya pemerintah hanya memainkan sebagian peranan dalam penyelenggaraan pendidikan. Beberapa pertanyaan lain yang relevan adalah apakah negara harus memberikan subsidi, atau apakah seharusnya pemerintah mengoperasikan lembaga-lembaga pendidikan sekolah? West (1970) menguji secara mendalam berbagai alasan mengapa pemerintah harus berperan aktif dalam pendidikan sebagaimana disarankan oleh para ahli ekonomi dan ahli-ahli lainnya. Alasan-alasan tersebut menyangkut proteksi negara pada kelompok minoritas, efek eksternalitas, upaya pendidikan merealisasikan perannya dalam kehidupan masyarakat, persamaan kesempatan, pencarian dan penemuan nilai-nilai umum serta efek pendidikan pada pertumbuhan ekonomi.

Pada dasarnya pembiayaan pendidikan (*educational finance*) dapat dimaknai sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai atau didana. Dalam hubungan ini Elchanan Cohn (1979:10) dalam Suharsaputra (2010) menguraikan lingkup pembiayaan pendidikan sebagai berikut: *Educational Finance. Who should pay for education? Should the government support public and private education? If so, which level of government should*

take what share of the burden? And what share of total costs should be borne by the taxpayers as opposed to direct beneficiaries of the educational endeavor? Also, if subsidies are justified, should they be given to educational institution or to individual in the form of a voucher?

Uraian di atas mempertanyakan bagaimana biaya pendidikan dapat dipenuhi. Siapa yang akan membiayai. Siapa yang dibiayai. Dan bagaimana dana yang telah didapat dikelola demi tercapainya tujuan

pendidikan, yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Chon (Fattah, 2000) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan pemerintah, sekolah, maupun orang tua. Sedang biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar.

Pengertian dari pembiayaan pendidikan adalah sebagaimana yang diutarakan Nanang Fattah bahwa pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.

Ada tujuh konsep penting terkait dengan pembiayaan yang meliputi (1) objek biaya, (2) informasi manajemen biaya, (3) pembiayaan, (4) keuangan, (5) anggaran, (6) biaya, (7) pemicu biaya. Sehubungan dengan hal tersebut, satu hal yang merupakan konsep penting dalam pembiayaan pendidikan adalah masalah biaya pendidikan yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan pula bahwa pembiayaan pendidikan sesungguhnya adalah sebuah analisis terhadap sumber-sumber pendapatan dan penggunaan biaya yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Klasifikasi Biaya Pendidikan

Dalam kaitannya dengan biaya pendidikan, Thomas (1985) dalam Mulyasa (2010) mengungkapkan adanya biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*), serta biaya masyarakat (*social cost*) dan biaya pribadi (*private cost*).

1. Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Direct cost (biaya langsung) yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan di mana biaya pendidikan ini

secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Biaya langsung akan berpengaruh terhadap output pendidikan. Biaya langsung terdiri atas biaya pembangunan dan biaya rutin.

Biaya pembangunan ialah biaya yang digunakan untuk pembelian tanah bangunan ruang kelas, perpustakaan, lapangan olah raga, konstruksi bangunan, serta penggantian dan perbaikan. Untuk menghitung besarnya biaya pembangunan digunakan konsep "capital cost per student place". Biaya pembangunan ini, terdiri atas tiga kelompok, yaitu untuk siswa di sekolah, asrama siswa, dan tempat tinggal guru.

Biaya rutin ialah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya rutin digunakan untuk menunjang pelaksanaan program belajar-mengajar, pembayaran gaji guru dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana. Untuk menghitung biaya rutin yang dibutuhkan seorang siswa per tahun di sekolah digunakan analisis unit *cost*.

Nilai unit *cost* merupakan nilai satuan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada seorang siswa per tahun dalam suatu jenjang pendidikan. Unit *cost* memberikan gambaran tentang besar biaya yang dikeluarkan dan tingkat pelayanan yang diberikan. Menghitung unit *cost* per siswa menurut Fatah (2000:26) dalam Mulyasa (2010) adalah membagi jumlah biaya yang tersedia dalam program anggaran dengan jumlah kredit yang diambil siswa per tahun dari program tersebut. Biaya program pengajaran per jam menurut (Thomas, 1985) dalam Mulyasa (2010) ditentukan oleh (1) gaji guru dan tenaga administrasi; (2) biaya ruang; (3) biaya perlengkapan dan alat; (4) biaya bahan pengajaran. Indirect cost (biaya tidak langsung) adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya.

2. Biaya Masyarakat dan Biaya Pribadi

Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh

pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya termasuk *social cost* (biaya masyarakat).

Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa, dan termasuk di dalamnya *forgone opportunities* (biaya kesempatan yang hilang).

Model-Model Pembiayaan Pendidikan/Sekolah

Merujuk pada beberapa sumber menurut para pakar, ada sebelas model pembiayaan pendidikan, yaitu (termasuk penjelasan singkatnya):

1. Model *flat grant (flat grant models)*

Menurut Lunenburg dan Ornstein, model *flat grant* ini adalah model bantuan negara untuk sekolah di daerah-daerah berdasarkan penggalian jumlah tertentu menurut jumlah yang dipertimbangkan. Model ini merupakan model pembiayaan pendidikan paling kuno, sederhana, dan metode keuangan sekolah yang paling tidak memadai. Bantuan negara untuk sekolah di daerah-daerah setempat berdasarkan pengalian jumlah tertentu menurut jumlah yang dipertimbangkan.

2. Model landasan perencanaan (*foundation plan models*)

Menurut Lunenburg and Orsnstein, model ini merupakan pendekatan yang paling umum dan tujuannya untuk menjamin pengeluaran tahunan yang minimal per siswa seluruh sekolah di daerah, terlepas dari kekayaan yang dapat dikenakan pajak lokal. Mekanisme foundation plant models adalah (1) negara menentukan biaya per siswa per tahun untuk program pendidikan; (2) negara menentukan angka pajak minimum; dan (3) negara mengabulkan permintaan setiap sekolah setempat akan jumlah yang sama terhadap perbedaan antara jumlah yang dinaikkan pada jumlah angka minimum dengan jumlah yang dikehendaki untuk membiayai tawaran-tawaran pendidikan yang minimum.

3. Model perencanaan pokok jaminan pajak (*guaranteed tax based plan models*)

Dalam model ini anggaran pendidikan ditentukan oleh seberapa besar pajak yang akan digunakan untuk pendidikan. Menurut Lunenburg dan Ornstein model ini merupakan rencana jaminan pajak mempunyai filosofi ekonomi yang sama seperti perencanaan, persamaan kemampuan, dan kapasitas yang berhubungan dengan keuangan dan pengeluaran sebanyak mungkin. Ini dibatasi dengan penafsiran penilaian per siswa yang mana jaminan negara diperuntukkan bagi wilayah sekolah setempat.

4. Model persamaan (*equalization models*)

John and Morphet mengemukakan dalam model ini, sumbangan-sumbangan negara dialokasikan pada sekolah di daerah-daerah setempat dalam proposi yang terbalik pada kemampuan pembayaran pajak setempat.

5. Model persamaan persentase (*percentage equalizing*)

Menurut Jones pada model ini, sumbangan-sumbangan negara dibagikan pada sekolah daerah-daerah setempat dalam proposi yang terbalik sesuai kemampuan pembayaran pajak setempat. Sumbangan lebih banyak disediakan untuk tiap murid, guru, atau kebutuhan yang lain yang dibagikan ke daerah-daerah yang kurang makmur daripada yang lebih makmur.

6. Model perencanaan persamaan kemampuan (*power equalizing plan*)

Menurut Lunenburg dan Ornstein, model ini merupakan suatu rencana negara dengan membayar sebagian kecil pengeluaran sekolah setempat dalam perbandingan inverse untuk daerah yang makmur (kaya).

7. Model pendanaan negara sepenuhnya (*full state funding model*)

Model pendanaan negara sepenuhnya adalah semua pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan didistribusikan ke sekolah distrik dengan dasar yang sama. Model ini merupakan rencana yang dirancang untuk mengeliminasi perbedaan lokal dalam hal pembelanjaan dan perpajakan.

8. Model sumber pembiayaan (*the resource-cost model*)

Model ini menyediakan suatu proses penentuan bagaimanakah pembiayaan pendidikan yang memadai agar didapatkan bantuan

financial yang mencerminkan kebutuhan yang mana kondisi ekonomi masyarakatnya berbeda setiap daerah.

9. Model surat bukti/penerimaan (*models choice and voucher plans*)

Menurut Lunenburg dan Ornstein, model surat bukti adalah suatu pendekatan yang dilakukan negara dengan memberikan banyak pilihan bagi sekolah dan orangtua di tempat anak mereka bersekolah. Ada dua prinsip dasar model ini, yaitu anak dari setiap keluarga adalah pusat kesatuan mendasar dalam menentukan bantuan anggaran pendidikan dan bantuan dapat digunakan dalam sekolah-sekolah umum atau sekolah kejuruan.

10. Model rencana bobot siswa (*weighted student plan*)

Menurut Lunenburg dan Ornstein, model ini adalah siswa-siswa dipertimbangkan dalam proporsi sifat-sifat yang khusus (contohnya cacat atau merugikan) atau siswa program khusus (contoh kejuruan atau siswa yang pandai dua bahasa) untuk menentukan biaya pengajaran per siswa.

11. Pendanaan berbasis anak (*child-based funding/ CBF*)

Menurut Jones, perencanaan pendanaan berbasis anak yang diterapkan untuk sekolah negeri dan sekolah swasta juga akan meningkatkan isu akan perundang-undangan, tetapi lebih kurang secara substansinya ada. Bantuan nyata berupa tanggungan secara menyeluruh atau kredit pajak untuk membantu anak-anak sekolah.

Di Indonesia tidak ada aturan baku model pembiayaan pendidikan yang digunakan. Akan tetapi, pembiayaan yang ada lebih menunjukkan bauran pembiayaan pendidikan meliputi pembiayaan oleh pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), masyarakat, dan sebagian investor. Sementara itu model bantuan pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah, lembaga-lembaga donor maupun masyarakat umumnya bersifat campuran dari beberapa model pembiayaan. Kondisi riil tentang pembiayaan pendidikan di Indonesia tersebut diperkuat oleh hasil penelitian *The Hickling Coorporation of Canada yang ditunjuk oleh Asian Development Bank (ADB)* untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pendanaan pada sistem pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian menginformasikan bahwa sistem penganggaran pendidikan di Indonesia sangat rumit. Tidak terdapat mekanisme yang

teratur untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai pembiayaan sekolah atau membandingkan perbedaan biaya-biaya antar jenjang dan jenis pendidikan. Belum ada data komprehensif mengenai biaya dan penganggaran pendidikan sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan menentukan kerangka kebijakan mobilisasi, alokasi sumber-sumber, dan efektifitas penggunaan biaya pendidikan.

5. Program Tunggakan Biaya Pendidikan di UPT JPD Dinas

Tunggakan sendiri memiliki artian yakni *arrears; delinquency* yaitu utang atau kewajiban lain yang telah jatuh tempo menurut perjanjian, tetapi belum atau tidak dilakukan pembayaran sepenuhnya atas utang atau kewajiban tersebut oleh pihak yang berutang atau yang harus memenuhi kewajiban tersebut. Menurut KBBI tunggakan diartikan sebagai *nomina (kata benda)*:

- (1) angsuran (pajak) yang belum dibayar: bulan ini ia akan melunasi tunggakannya;
- (2) sisa pekerjaan: jumlah tenaga baru sekarang ini cukup untuk menangani tunggakan itu.

Tunggakan Biaya Pendidikan merupakan program pemerintah kota yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga pemegang KMS sehingga akses pendidikan dapat terjangkau di semua lapisan masyarakat. Bantuan diberikan di tiap jenjang baik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK baik negeri ataupun swasta. Bantuan meliputi biaya personal dan biaya operasional sekolah.

Persyaratan Pengajuan Tunggakan Biaya Pendidikan dibagi menjadi tiga macam:

- Peserta Didik Lulus Tahun 2016 Keluarga Pemegang KMS

Syarat pengajuannya:

- a) Rincian tunggakan biaya pendidikan dari kepala satuan pendidikan
- b) Fotocopy KK/C1 Kota Yogyakarta dilegalisir kelurahan
- c) Fotocopy KMS dilegalisir kelurahan
- d) Fotocopy akte kelahiran
- e) Jika sekolah di luar kota Yogyakarta ditambah surat keterangan dari sekolah bahwa anak tersebut benar-benar sekolah di sekolah tersebut.
- f) Masing-masing dibuat rangkap dua

- Peserta Didik Lulus Tahun 2016 Keluarga Non KMS

Syarat pengajuan:

- a) Rincian tunggakan biaya pendidikan dari kepala satuan pendidikan
- b) Surat keterangan verifikasi dari sekolah
- c) Fotocopy KK/C1 Kota Yogyakarta dilegalisir kelurahan
- d) Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW diketahui kelurahan
- e) Fotocopy akte kelahiran
- f) Surat rekomendasi dari dinsosnakertrans Yogyakarta
- g) Masing-masing dibuat rangkap tiga

- Peserta Didik Telah Lulus Tahun 2005-2015

- a) Surat keterangan dari orangtua jika tidak sanggup membayar
- b) Rincian tunggakan biaya pendidikan dari kepala satuan pendidikan
- c) Surat keterangan verifikasi dari sekolah
- d) Fotocopy KK/C1 Kota Yogyakarta dilegalisir kelurahan
- e) Fotocopy KMS dilegalisir kelurahan (jika ada)
- f) Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW diketahui kelurahan (non KMS)
- g) Surat keterangan dari sekolah yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan belum pernah menerima bantuan tunggakan biaya pendidikan dari Pemerintah Kota Yogyakarta
- h) Fotocopy akte kelahiran

Alur pengurusan di JPD pun sangat mudah yaitu mulai dari orangtua siswa menyiapkan berkas-berkas, berkas dikumpulkan disekolah (sekolah dalam kota) ataupun diserahkan langsung ke UPT JPD (luar kota). Jika persyaratan tersebut tidak segera diurus, maka peserta didik kehilangan hak untuk mendapatkan jaminan biaya pendidikan.

Besaran Jaminan Pendidikan Daerah dalam satu tahun pelajaran untuk siswa KMS:

JENJANG	Negeri	Swasta
TK	700.000	1.400.000
SD	700.000	1.700.000
SMP	800.000	2.500.000
SMA	3.000.000	3.500.000
SMK	3.000.000	4.500.000

Besaran Jaminan Pendidikan Daerah dalam satu tahun pelajaran untuk siswa Non KMS:

Skor	Prosentase	SD	SMP	SMA	Paket A	Paket B	Paket C
16-20	25%	375.000	750.000	875.000	125.000	162.500	200.000
21-25	50%	750.000	1.500.000	1.750.000	250.000	325.000	400.000
26-30	75%	1.125.000	2.250.000	2.625.000	375.000	487.500	600.000
31-100	100%	1.500.000	3.000.000	3.500.000	500.000	650.000	800.000

Penggunaan dana tunggakan biaya pendidikan juga telah diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan pemerintah. Di dalamnya terdapat berbagai hal yang mengatur tentang pelaksanaan program tunggakan biaya, seperti hal-hal yang boleh dibiayai dan yang tidak boleh dibiayai, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus diikuti, dan lain-lain.

B. Pelaksanaan Program

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti memaparkan hasil penelitian menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat bukan dalam bentuk angka maupun analisis data statistik.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dimana peneliti membawa daftar pertanyaan sebagai acuan dalam pengambilan data dari responden atau narasumber kemudian peneliti menguraikan maupun memaparkan dengan kata-kata sesuai pernyataan responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Selain itu untuk memperkuat data yang dicari, peneliti melakukan dokumentasi dan observasi langsung di lapangan.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta serta sekolah tingkat menengah kejuruan yang menerima bantuan program tunggakan biaya pendidikan.

4. Waktu Penelitian

Secara keseluruhan waktu yang digunakan selama tiga bulan dengan kegiatan dan jadwal sebagai berikut :

NO	KEGIATAN PENELITIAN	BULAN KE				KETERANGAN
		5	7	8	9	
1	Menyusun Rencana Penelitian	V				
2	Menyusun Instrumen Penelitian		V			
3	Mengumpulkan Dan Analisis Data			V		
4	Penulisan Laporan				V	
5	Presentasi				V	

5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang dari penelitian ini adalah data dari pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta di bagian UPT JPD dan sekolah penerima bantuan program tunggakan biaya pendidikan.

b. Data Sekunder

Sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, majalah, sumber internet yang berkenaan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi tatap muka. Pewawancara selalu menjadi pihak yang bertanya, dan narasumber selalu menjadi pihak yang menjawab pertanyaan. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Narasumber tersebut antara lain, kepala UPT JPD, karyawan, dan kepala sekolah.

b. Observasi

Jenis observasi adalah observasi partisipatif dimana peneliti terjun langsung dengan obyek penelitian, namun hanya sebagian. Observasi yang dilakukan bertempat di UPT JPD Dinas Kota Yogyakarta dengan mengamati program tunggakan biaya pendidikan serta ke sekolah-sekolah penerima bantuan.

c. Dokumentasi

Yaitu berupa alat yang dapat mendukung data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa alat dokumentasi antara lain: catatan anekdot, record/video, foto, check list yang membantu dalam proses menganalisis data. Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 231) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variebel yang berupa catatan, portofolio, majalah, agenda dan sebagainya. Analisis dokumen sangat berguna dalam menambah pengetahuan penting mengenai suatu bidang studi.

7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data primer dari responden. Berkaitan dengan apa yang akan diteliti maka peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumentasi (kamera, *type recorder*, dll).

8. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan data

Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari kepala UPT JPD, karyawan, dan kepala sekolah.

b. Reduksi Data

Proses reduksi data ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data sehingga mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

c. Penyajian Data

Penyajian data dalam laporan penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif. Penyajian data disajikan dalam bab deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil pembahasan.

9. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan dengan melihat obyek penelitian, dan mempertanyakan kembali hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber, sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih baik. Selain itu peneliti perlu mendiskusikan agar data yang diperoleh serta penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.

10. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Peneliti mencantumkan kriteria keabsahan data yang diperlukan dalam pendekatan penelitian kuantitatif ini yaitu keabsahan konstruk yang di dalamnya terdapat empat triangulasi.

Empat macam triangulasi untuk mencapai keabsahan data tersebut dalam penelitian ini yaitu:

1) Triangulasi data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2) Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dosen pembimbing penelitian bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

3) Triangulasi Teori

Penggunaan teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

4) Triangulasi Metode

Penggunaan metode untuk meneliti berbagai hal misalnya wawancara, observasi, eksperimen. (Sugiyono, 2010: 190-193)

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian triangulasi metode dan triangulasi data. Kedua pendekatan ini dipilih karena penelitian ini adalah penelitian yang objeknya adalah karyawan di UPT JPD dan pihak sekolah. Dipilihnya pendekatan ini juga karena metode penelitian banyak menggunakan wawancara dan observasi.

C. Analisis Hasil Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMK N 3 Yogyakarta, dan SMK Tamansiswa Jetis, pada bulan Juli sampai September 2016 dalam lingkup dinas pendidikan kota Yogyakarta dan sekolah-sekolah menengah kejuruan yang memiliki kekurangan biaya pendidikan di sekolahnya. Observasi dilakukan di dua sekolah dimana peneliti mengamati langsung. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan para guru atau karyawan sekolah yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mengurus pengajuan tunggakan biaya pendidikan. Penelitian ini difokuskan pada tataran implementasi atau pelaksanaan program di JPD yaitu program tunggakan biaya pendidikan. Berbagai polemik terkait dengan maraknya penahanan ijazah oleh sekolah, perekonomian/pendapatan orangtua siswa yang tidak

cukup untuk membayar, sekolah dalam pendataan dan pengajuan tunggakan biaya siswanya terkadang terlambat, jumlah bantuan yang diberikan oleh pihak dinas kota tidak selalu sesuai dengan jumlah tunggakan biaya pendidikan siswa, dll.

SMK Tamansiswa Jetis beralamatkan di Jalan Pakuninggratan No.34 A, Yogyakarta. Di depan kelas dan seluruh tempat penuh dengan sepeda motor siswa sehingga mengganggu akses jalan dan kurang rapi dalam penataannya. SMK N 3 Yogyakarta terletak di Jalan R.W. Mangunsidi No.2 Yogyakarta. Dipilihnya kedua SMK tersebut dikarenakan SMK Tamansiswa Jetis dan SMK N 3 Yogyakarta merupakan sekolah menengah kejuruan yang memiliki peringkat teratas dari 17 SMA dan 23 SMK di Yogyakarta dengan jumlah siswa terbanyak dalam mengajukan tunggakan biaya di dinas pendidikan kota Yogyakarta. Data diperoleh berdasarkan data sekunder yakni database pengajuan tunggakan biaya pendidikan tahun 2016. Penelitian dilakukan di jenjang sekolah menengah atas ataupun kejuruan dikarenakan pada jenjang ini masih marak terjadi penahanan ijazah dan surat-surat lainnya karena belum melunasi biaya pendidikan yang ditempuh, padahal kebanyakan ijazah sangat diperlukan untuk melamar pekerjaan tertentu ataupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, bahkan ada beberapa perusahaan yang syaratnya ialah mengumpulkan ijazah. Namun, kebanyakan sekolah swasta/yayasan tetap bersikukuh untuk memilih menyimpan ijazah siswa yang belum lunas lain halnya dengan negeri, mengingat terdapat larangan untuk menahan ijazah meskipun belum melunasi tetapi ijazah tetap bisa disimpan siswa.

Berikut ini beberapa informasi yang didapatkan dari narasumber yang peneliti temui. Pertama, Bapak Misdar, S.E. MM. (48 tahun) beliau adalah guru di SMK Tamsis Jetis dibagian Pengembangan Kurikulum, mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Kewirausahaan. Beliau menjadi guru sejak tahun 1993. Setelah saya wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan beliau mengungkapkan yang menjadi masalah menyangkut tunggakan biaya pendidikan adalah masalah ketidakmampuan orangtua siswa karena yang sekolah di sini 99% berasal dari keluarga kurang mampu. Jika surat rekomendasi dari dinas sudah ada maka kita terima lalu ijazah baru kita serahkan kepada siswa. Mayoritas siswa yang mengusulkan adalah siswa non KMS karena siswa yang memegang KMS tiap tahunnya telah mendapatkan subsidi dana dari pemerintah kota.

Bagi siswa yang telah lulus namun masih mempunyai tunggakan tetaplah harus melunasi dulu dengan membuat dispensasi atau pernyataan bahwa kalau orangtua belum bisa lunas maka orangtua tidak akan mengambil ijazah, mengingat ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Terdapat pula orangtua siswa yang memiliki tunggakan sampai 10 juta namun tidak berniat melunasi. “kita bisa apa?”, ungkapnya. Beliau juga menyinggung adanya Baznas (Badam Amil Zakat Nasional) di Sleman yang membantu kekurangan orangtua siswa dari Sleman berapapun jumlahnya. Beliau juga mengungkapkan bahwa pernah ada perusahaan dimana siswa akan bekerja tetapi sekolah tidak memberikan ijazahnya karena memiliki banyak risiko. “Secara aturan memang gak boleh menahan ijazah, tetapi dari pemerintah sendiri belum memberikan solusi karena nominal tunggakan yang begitu besar yakni puluhan juta karena sekolah sangat memberi kesempatan orangtua untuk menganggurnya namun hanya satu atau dua anak saja yang mengangsur”, ungkap Beliau.

Kesulitan yang beliau utarakan adalah kesulitannya saat informasi disampaikan kepada orangtua dan siswa yang merespon hanya 50%. Jika tunggakan memang ringan bisa diberikan ijazah terlebih dulu dengan syarat bekerja. Pak Misdar sendiri mengakui membenarkan aturan untuk tidak menahan ijazah namun susah apabila diterapkan di sekolah-sekolah swasta atau yayasan, maka harusnya ada kebijakan lain untuk sekolah-sekolah swasta.

Kedua, Bapak Tahrim Tasinaga, karyawan TU SMK N 3 Yogyakarta. Beliau ditugaskan berdasarkan SK dari sekolah untuk mengurusi urusan JPD. Wawancara saya lakukan pada hari Jumat, 9 September 2016 pukul 10.00 WIB. Setelah saya menanyakan perihal masalah terkait tunggakan biaya maka beliau menjawab, “anak-anak saat duduk di kelas satu membayar uang gedung atau sumbangan investasi senilai Rp2.800.000, kebanyakan tunggakan bersumber dari sumbangan investasi awal masuk.” Di SMK Negeri 3 sendiri untuk ijazah tidak ada yang pernah ditahan karena sudah aturan dari dewan. Ada edaran dari dinas yang isinya sekolah agar supaya mendata siswa yang menunggak kalau ada siswa yang tidak memiliki KMS maka ia harus ke Dinas Sosial. Prosedur sekolah dalam mengajukan bantuan ialah sesuai dengan yang disosialisasikan pihak JPD kemudian memanggil kepala sekolah atau petugas khusus. Baru kemudian sekolah menyampaikan kepada orangtua di akhir tahun pelajaran lalu lapor kepada wali BK (Bimbingan Konseling) baru kemudian dibuatkan surat verifikasi

siswa oleh Pak Tahirim. Kerjasama dengan pihak BK berupa *home visit* bagi yang tidak memiliki KMS. Selama ini sekolah juga berupaya setiap tahun ajaran baru memberi tahu kepada anak kalau punya kekurangan. Mengingat tidak ada ijazah yang ditahan meskipun siswa sudah lulus karena sekolah juga bekerja sama dengan bank. Sekolah juga memastikan tidak akan ada siswa yang mengajukan sampai dua kali karena hal tersebut tidak boleh dan sudah ada pula rekap data-data siswa yang mengajukan. Bagi pak Tahirim, selama ini beliau belum mengalami kesulitan karena orangtua merasa tertolong sehingga mereka mengikuti saja apa yang diarahkan.

Ketiga, Ibu Sri Kusnoati atau yang akrab disapa dengan Bu Titik JPD adalah satu-satunya karyawan JPD yang sudah 8 tahun bekerja di JPD. Wawancara dilakukan di sela-sela kegiatan bertempat di kantor JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta hari Selasa, 2 Agustus 2016 pukul 13.00 WIB.

Menjawab pertanyaan penelitian, Bu Titik mengungkapkan tujuan dari adanya program tunggakan biaya pendidikan ini agar tidak ada ijazah yang tertinggal di sekolah supaya nantinya bisa dipakai untuk mencari pekerjaan. Sekolah, orangtua, dan pemerintah sama-sama memiliki keterlibatan dalam berjalannya program tunggakan biaya pendidikan, dimana pemerintah ikut andil dalam masalah pendanaan, sekolah dan orangtua juga punya andil sendiri. Sehingga tidak semua tanggungan dibebankan kepada pemerintah tetapi kerjasama ketiga komponen tersebut. Sosialisasi hanya diperuntukkan sekolah bukan orangtua langsung tujuannya agar orang tua tidak lepas tanggung jawab dalam membiayai sekolah anak. Di dalam mekanisme pencairan dana terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, setelah rangkaian persyaratan lengkap di rekap oleh pihak JPD, diajukan ke keuangan, kemudian ke pemerintah kota, baru di transfer ke nomor rekening sekolah masing-masing. Ada beberapa faktor yang mendukung program ini, yaitu ketersediaan dana, mengingat program ini sudah menjadi kebijakan pemerintah kota dengan adanya peraturan-peraturan walikota yang cukup jelas pula. “Hambatan yang sering saya alami juga karyawan lainnya ialah jika tunggakan terlalu besar sedangkan jumlah bantuan yang kita berikan itu sudah mencapai maksimal kita juga sering merasa kasihan, kemudian skor dari dinas sosial terkadang ada yang benar-benar miskin dan sangat membutuhkan bantuan biaya lebih tetapi diberi skor rendah sedangkan untuk yang berkecukupan malah diberikan skor yang tinggi. Lemahnya sistem kita yang belum update itu juga menjadi kendala,”ungkap Bu Titik. Sehingga setiap tahunnya JPD terus melakukan

evaluasi bersama agar tidak terjadi lagi kendala-kendala yang muncul. JPD juga mengusahakan meminta dana kepada pemerintah kota untuk memajukan sistem agar lebih bagus lagi dan memudahkan pelayanan.

Dari pembahasan di atas sesuai dengan pendapat Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul “Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum” di mana implementasi merupakan sebuah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Program Tunggakan Biaya pendidikan merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota Yogyakarta yang telah dirumuskan dan direncanakan secara matang guna mengentaskan adanya penahanan ijazah di Kota Yogyakarta serta untuk tercapainya wajib belajar bagi siswa Kota Yogyakarta. Di dalam pelaksanaannya, program tersebut juga memiliki acuan yakni dapat berupa peraturan walikota maupun keputusan wali kota ataupun petunjuk teknis pelaksanaan program Tunggakan Biaya Pendidikan sehingga dalam pelaksanaan program tidaklah asal-asalan namun sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah kota.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program tunggakan biaya pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak ada sosialisasi (hanya dilakukan dengan pihak sekolah), karena jika mengadakan sosialisasi para orang tua siswa akan lepas tanggung jawab dalam membiayai pendidikan anaknya dan semakin banyak orang tua yang sebenarnya mampu membayar namun tidak membayar supaya dapat bantuan tunggakan. Alur pengurusan di JPD pun sangat mudah yaitu mulai dari orangtua siswa menyiapkan berkas-berkas, berkas dikumpulkan di sekolah (sekolah dalam kota) ataupun diserahkan langsung ke UPT JPD (luar kota). Di UPT JPD sendiri, sumber daya manusia memang kurang memadai dibandingkan dengan banyaknya program kerja. Sumber Daya Manusia di UPT JPD terdiri dari 1 Kepala Bidang UPT JPD, 1 Kepala TU, 1 bendahara dan 2 staff. Namun, dalam menjalankan banyaknya program di JPD sendiri telah diatur jadwalnya yakni membagi program dengan periode tertentu dengan fokus program tertentu.

Ada beberapa faktor yang mendukung program tunggakan biaya, yaitu ketersediaan dana, mengingat program ini sudah menjadi kebijakan pemerintah kota dengan adanya peraturan-peraturan walikota yang cukup jelas pula. Dalam pelaksanaannya, program tunggakan biaya pendidikan memiliki hambatan terutama jumlah tunggakan yang terlalu besar sedangkan jumlah bantuan yang kita berikan itu sudah mencapai maksimal. UPT JPD setiap tahunnya juga melakukan evaluasi atau monitoring bersama-sama.

B. Saran

1. Bagi Sekolah : Sekolah-sekolah khususnya swasta lebih baiknya lagi tidak menahan ijazah siswanya, terlebih jika rincian tunggakan adalah mengenai SPP padahal ada dana Bos atau Bosda.
2. Pihak JPD : Memberikan penjelasan mengenai adanya Baznas yang tidak hanya ada di kabupaten tertentu, tetapi di kota juga ada guna membantu orang tua siswa yang memiliki tunggakan biaya yang sangat besar karena ada beberapa sekolah yang tidak tahu menahu tentang keberadaan Baznas di wilayah kota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Atmadi & Y. Setiyaningsih. 2000. *Transformasi Pendidikan Memasuki Millenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius

Arif Rohman. 2012. *Kebijakan Pendidikan (Analisis dari Formulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Sudiyono. 2007. *Buku Ajar “Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Pendidikan.”* Administrasi Pendidikan: FIP

Suharsimi Arikunto, dkk. 2006. *Penelitian Tindakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Diunduh dari:

<http://eprints.undip.ac.id/40198/6/08---bab2.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29235/3/Chapter%20II.pdf>

<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/implementasi-dan-monitoring-kebijakan.pdf>

<http://www.trigonalmedia.com/2015/03/pengertian-biaya-menurut-para-ahli.html>

Heru Jarot Cahyono. Diunduh dari:
<http://www.antarayogya.com/berita/299445/bantuan-tunggakan-biaya-dari-jpd-diusulkan-dievaluasi>

Keputusan Walikota Nomor 271 Tahun 2016. Diunduh dari:
<http://hukum.jogjakota.go.id/data/Kepwal%20Nomor%20271%20Tahun%202016%20ttg%20Pemberian%20JPD%20kpd%20Peserta%20Didik%20Pemegang%20KMS,%20putus%20Sekolah.pdf>

http://www.krjogja.com/web/news/read/200304/yessbiaya_pendidikan_d

i_yogya_makin_terjangkau

<https://binpers.wordpress.com/2014/06/21/penahanan-ijazah-adalah-pelanggaran-undang-undang-no-202003/>

<http://www.republika.co.id/berita/koran/didaktika/16/02/18/o2qc253-ijazah-tertahan-di-sekolah-dikembalikan>

<http://jabar.pojoksatu.id/bekasi/2016/02/28/demokrat-jangan-ada-lagi-penahanan-ijazah-siswa/>

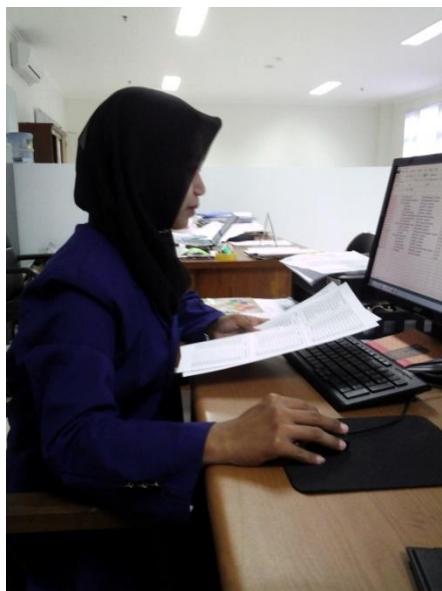
LAMPIRAN
DOKUMENTASI KEGIATAN



Kondisi sebelum dibersihkan



Kondisi setelah kerja bakti



Kegiatan Merekap Data



Kegiatan kerja Bakti



Kegiatan Rapat sosialisasi KMS



Kegiatan Lomba HUT RI



Wawancara dengan Bp. Misdar SMK Tamansiswa Jetis





Wawancara dengan Bp. Tahrim SMK N 3 Yogyakarta

MATRIKS PROGRAM KERJA PPL/MAGANG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama Lembaga : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
 Alamat Lembaga : Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta 55212
 Dosen Pembimbing Lapangan : Ariefa Efianingrum, M.Si.
 Nama : Shinta Rahmawati
 NIM : 13110241065
 Prodi/Fak : Kebijakan Pendidikan/FIP

No	PROGRAM PPL	Jumlah Jam per Minggu								JUMLAH JAM	
		JULI		AGUSTUS			SEPTEMBER				
		III	IV	I	II	III	IV	I	II		
1	Pembuatan Progaram PPL										
	a. Observasi		8							8	
	b. Menyusun Proposal Program PPL		14							14	
	c. Konsultasi dan Pengesahan Proposal Program	2		3						5	
	d. Menyusun Matrik Program PPL	2								2	
2	Pelaksanaan Program Individu										
	a. Persiapan										
	1) Konsultasi	2	1	1	1		1			6	
	2) Persiapan Materi		2							2	
	b. Pelaksanaan										
	1) Observasi						2			2	
	2) Wawancara terkait Implementasi Program Biaya Tunggakan					1	2	3	3	9	

	3) Analisis Data dan hasil laporan						5	4	9
3	Pelaksanaan Program Tambahan								
	a. Penerjunan dan Perkenalan Tiap Bidang	2							2
	b. Administrasi di Lembaga								
	1. Menomori dan mengurutkan proposal Bosda TK	2,5	5,5						8
	2. Merekap data Tunggakan Biaya tahun 2016	5	6,5						11,5
	3. Merekap data Tunggakan Biaya tahun 2015			5	4				9
	4. Merekap data Tunggakan Biaya tahun 2014				3				3
	5. Rapat koordinasi pencairan dana tunggakan tahap II tahun 2016	2		2					4
	6. Mengikuti rapat koordinasi RAPBS SMP se-kota Yogyakarta			2					2
	7. Pelayanan masyarakat terkait tunggakan biaya sekolah, KMS, maupun KIP	3	3	3	3	3	2	2	22
	8. Pelayanan meliputi pengumpulan proposal, SPJ, dan lain-lain.				1	1	1	1	5
	9. Mengikuti kegiatan verifikasi laporan				10				10

	BOS								
	10. Sosialisasi Pencairan KMS Sleman (JPPD Sleman) SMA/SMK Yogyakarta yang memiliki murid di Sleman					2			2
	11. Rapat koordinasi outbond/softskill KMS SMP se-Yogya					2			2
	12. Rapat koordinasi beasiswa prestasi Kelurahan se-Yogya			2			2		4
	13. Penyiapan siswa KMS SMP untuk outbond					4			4
	14. Rapat sosialisasi KMS luar kota				2	2			4
	15. Acara Hari Qurban						3		3
	16. Acara Lomba HUT RI ke-71			3					3
	17. Pelayanan tanda terima BOP dan honor kelurahan					1	1		2
	18. Kerja Bakti				3	19	9	2	33
4	Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Prodi								
	1) Rekap data siswa yang memiliki tunggakan		5	3	3	4	3	1	23
	2) Rekap data KMS						6	7	13

5	Pelaksanaan Kegiatan Rutin	Jumlah Jam							
		5	5	5	5	5	4	34	
	a) Apel Pagi	1	1		1	1	1	7	
	b) Senam Pagi			1,5			1,5	3	
	c) Pengajian di Masjid Al-Falah							269,5	

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan

Ariefa Efianingrum, M.Si
NIP. 19740411 199802 2001

Yogyakarta, September 2016
Mahasiswa

Shinta Rahmawati
NIM: 13110241065

CATATAN HARIAN PPL/MAGANG
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Nama Lembaga	: Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta	Nama	: Shinta Rahmawati
Alamat Lembaga	: Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta 55212	NIM	: 13110241065
Dosen Pembimbing		Prodi/Fak	: Kebijakan Pendidikan/FIP
Lapangan	: Ariefa Efianingrum, M.Si.		

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan
1	Senin, 18 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		13.00-15.20	Menomori dan mengurutkan proposal sekitar 30 proposal bosda TK yang masuk setelah itu melayani pengumpulan pengajuan tunggakan biaya pendidikan
2	Selasa, 19 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Merekap data dari surat rekomendasi biaya tunggakan tahun 2016 sebagai database
		13.00-14.15	Mengikuti rapat koordinasi pencairan dana tunggakan tahap II tahun 2016 sekaligus membantu konsumsi undangan
		14.15-15.43	Melanjutkan rekап data dari surat rekomendasi tahun 2016 sebagai database
3	Rabu, 20 Juli	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota

	2016	08.00-08.30	Menomori proposal Bosda
		08.30-13.00	Melanjutkan rekap data tunggakan biaya sambil melayani pembuatan surat rekomendasi yang diketahui kepala bidang
		14.00-15.50	Melanjutkan rekap data terkumpul sebanyak 339 data
4	Kamis, 21 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Merekap data Tunggakan Biaya tahun 2015 sebagai database
		13.00-15.40	Melanjutkan rekapan
5	Jumat, 22 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.00	Senam Pagi bersama pegawai dinas
		09.30-14.30	Melanjutkan rekapan Tunggakan Biaya tahun 2015 sebanyak 250 data
6	Senin, 25 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-10.00	Melanjutkan rekap data tahun 2015
		11.00-14.30	Menomori proposal Bosda TK Swasta dari UPT Barat, Timur, Selatan, dan Utara
7	Selasa, 26 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		11.00-13.00	Menomori undangan untuk hari Jumat yang akan datang

		13.00-15.00	Mengurutkan proposal yang sudah diberi nomor, sekitar 211 buah
8	Rabu, 27 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		09.00-11.30	Pelayanan masyarakat terkait tunggakan biaya sekolah, KMS, maupun KIP
		13.15-14.35	
9	Kamis, 28 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-12.00	Merekap data Tunggakan Biaya tahun 2014 sebagai database
		13.40-14.50	Pelayanan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan
10	Jumat, 29 Juli 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.00	Senam di halaman samping masjid
		09.15-11.45	Melanjutkan rekап data tunggakan biaya tahun 2014
		14.00-16.10	

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Kegiatan
11	Senin, 1 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-selesai	Pelayanan masyarakat yang mengajukan KMS luar kota
12	Selasa, 2 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		09.30-selesai	Pelayanan KMS luar kota sebanyak 19 orang baik dari Sleman, Bantul, dan Gunungkidul
13	Rabu, 3 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-selesai	Pelayanan masyarakat tentang KMS, Pengajuan Tunggakan, dan KIP
14	Kamis, 4 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-selesai	Pelayanan masyarakat tentang KMS, Pengajuan Tunggakan, dan KIP
15	Jumat, 5 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.00	Pengajian di Masjid
		09.00-11.30	Mengikuti rapat koordinasi RAPBS SMP se-kota Yogyakarta di ruang Truntum lantai 2 sekaligus konsumsi
16	Senin, 8 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota

		09.00-10.30	Sosialisasi pencairan dana Tunggakan, di isi oleh Pak Agus Trimadi sekaligus mengurus konsumsi
		13.15-15.30	Pelayanan masyarakat
17	Selasa, 9 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-12.30	Pelayanan masyarakat
18	Rabu, 10 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		09.30-13.00	Pelayanan masyarakat
		14.30-17.15	Membantu Pak Agus (Ka.TU) dalam menyelesaikan laporan kerjanya sebanyak 3 bendel, milestone 1-15
19	Kamis, 11 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		10.00-12.00	Membantu menyelesaikan laporan kegiatan Pak Agus sebanyak 3 bendel, milestone 1-15
		13.15-15.00	Pelayanan masyarakat yang mengajukan KMS
20	Jumat, 12 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.00	Senam pagi
		09.30-11.30	Pelayanan meliputi pengumpulan proposal, SPJ, dan lain-lain.
21	Senin, 15 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Mengikuti kegiatan verifikasi laporan BOS SD & SMP di ruang UKS sekaligus konsumsi

		13.30-15.00	Pelayanan masyarakat
22	Selasa, 16 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Mengikuti kegiatan verifikasi laporan BOS di ruang UKS sekaligus konsumsi
23	Senin, 22 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		09.00-11.30	Pencairan KMS Sleman (JPPD Sleman) di ruang wahyu tumurun peserta SMA/SMK Yogyakarta yang memiliki murid di Sleman
24	Selasa, 23 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-13.30	Pelayanan Masyarakat
25	Rabu, 24 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-14.45	Pelayanan Masyarakat
26	Kamis, 25 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		13.00-14.30	Rapat koordinasi outbound/softskill KMS SMP se-Yogya, peserta 75
27	Jumat, 26 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.00	Senam Pagi
		10.00-11.30	Pelayanan Masyarakat
		13.00-15.50	Kerja Bakti membersihkan gudang kantor
28	Senin, 29 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota

		09.00-11.00	Rapat koordinasi beasiswa prestasi Kelurahan se-Yogya di K.Bribil, 55 kelurahan yg hadir
		13.15-15.00	Kerja Bakti membersihkan gudang kantor

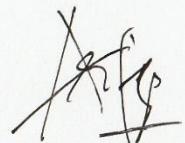
29	Selasa, 30 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Kerja Bakti membersihkan gudang kantor bersama cleaning service
		13.15-15.00	
30	Rabu, 31 Agt 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Kerja Bakti membersihkan gudang kantor bersama cleaning service
		13.15-15.00	
31	Kamis, 1 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Kerja Bakti membersihkan gudang kantor bersama cleaning service
		13.15-15.00	
32	Jumat, 2 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-12.00	Kerja Bakti membersihkan gudang kantor
		13.15-15.00	
33	Senin, 5 Sept 2016	07.00-08.00	Penyiapan siswa KMS SMP untuk outbound di Kaliurang yang akan dinaikkan di 6 bus
		08.00-11.00	pelayanan masyarakat KMS tahap 2
		13.00-15.30	Melanjutkan kerja bakti, berkas yg sudah tidak terpakai disingkirkan dan yg masih penting ditaruh baseman

34	Selasa, 6 Sept 2016	07.00-08.00	Penyiapan siswa KMS SMP untuk outbond di Kaliurang yang akan dinaikkan di 6 bus
		08.00-09.30	Pengajian di Masjid Al Fallah diisi oleh SMA N 6
		11.00-14.30	Melanjutkan kerja bakti
35	Rabu, 7 Sept 2016	07.00-08.00	Penyiapan siswa KMS SMP untuk outbond di Kaliurang yang akan dinaikkan di 6 bus
		09.00-13.30	Melanjutkan kerja bakti
36	Kamis, 8 Sept 2016	07.00-08.00	Penyiapan siswa KMS SMP untuk outbond di Kaliurang yang akan dinaikkan di 6 bus
		13.00-14.00	Menelfon sekolah untuk rapat pencairan KMS luar kota pada hari Jumat

37	Jumat, 9 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.00	Senam pagi
		09.00-09.30	Menelfon sekolah untuk rapat pencairan KMS luar kota yang belum tersambung
		10.00-11.00	Wawancara SMK N 3 Yogyakarta
		11.00-12.00	Wawancara SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta
		13.00-14.30	Rapat sosialisasi KMS luar kota di lantai 4
38	Senin, 12 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.00-09.30	Menelfon sekolah untuk rapat pencairan KMS luar kota yang belum tersambung
		10.00-11.00	Wawancara SMK N 3 Yogyakarta
		11.00-12.00	Wawancara SMK Tamansiswa Jetis Yogyakarta
39	Selasa, 13 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		08.30-12.00	Pelayanan sekolah tentang SPJ
40	Rabu, 14 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		09.00-12.00	Ikut serta dalam acara Qurban yakni memotong daging qurban
41	Kamis, 15 Sept 2016	07.30-08.00	Apel pagi di halaman dinas pendidikan kota
		13.00-14.30	Sosialisasi antar pihak JPD terkait beasiswa prestasi kelurahan

Yogyakarta, September 2016

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Lapangan



Ariefa Efianingrum, M.Si
NIP. 19740411 199802 2001

Mahasiswa



Shinta Rahmawati
NIM: 13110241065

